

PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
 (Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 18 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
UNIT KERJA : BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ABDUL KADIR
 2. Jabatan : KUASA PENGGUNA ANGGARAN
 3. NHK : 699399

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	900.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 122 m ² /60 m ² di KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	273.500.000
1. MOBIL, NISSAN MARCH MINIBUS Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000		
2. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA MATIC Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 15.500.000		
4. MOTOR, HONDA VARIO 125 NEW MATIC Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 23.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	17.137.119
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.190.637.119
III. HUTANG	Rp.	112.050.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.078.587.119

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan